

Tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri No. 615/PID-B/1999/PN.JKT.PST yang dikaitkan dengan ketentuan pasal 38, pasal 39 dan pasal 39A Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan / Ronny

Ronny, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20269899&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Perjanjian kerjasama antara Roy Bestly dan Pirmauli Simanjuntak atas Jasa Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk pembayaran Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank BNI, direalisasikan dengan penyerahan Surat Setoran pajak (SSP) dan cek PT. Telkomsel, yang ternyata penyetoran Surat Setoran pajak (SSP) ke Bank BNI tersebut tidak dilakukan. Hal tersebut memunculkan adanya indikasi penggelapan uang Negara berupa Surat Setoran Pajak (SSP) PT Telkomsel, sehingga Jaksa Penuntut Umum mendakwa Ario. P, Posma Situmorang dan Bemhard. P dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena Ario. P, Posma Situmorang, dan Bemhard. P telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga hal tersebut di peroleh dari kejahatan yang menyebabkan kerugian kepada Negara, maka secara tidak langsung hal tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang merupakan penggelapan terhadap suatu pajak, maka dari Jaksa Penuntut umum mendakwa dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selain hal tersebut, Putusan Pengadilan Nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST telah sesuai dengan kaidah hukum perpajakan, dikarenakan Ario. P, Posma Situmorang, Bemhard. P, Roy Bestly dan Tri Suwito. A, melakukan perjanjian kerjasama yang berindikasi kepada penggelapan uang Negara, yaitu berupa pajak, selain itu mereka juga melakukan unsur kesalahan berupa kealpaan atau kesengajaan (pasal 38, pasal 39, dan pasal 39A), maka dari itu Putusan Pengadilan Nomor 615/PID.B/1999/PN.JKT.PST sesuai dengan kaidah hukum perpajakan.

<hr>

ABSTRACT

Agreement of cooperation between Roy Bestly and Simanjuntak, Pirmauli top Payment Services Tax (Income Tax) and Value Added Tax (PPn) Letters to deposit tax payments (SSP) to the Bank BNI, realized with the delegation letter deposi tax (SSP) and PT Telkomsel checks, which appeared for the Letters deposit tax (SSP to the Baric BNI is not done. This is an indication raise money embezzlement State ax form letter deposit (SSP) PT Telkomsel, so that the General Prosecutor alleges Ano. P, Posma Situmorang and Bernhard. P with the Book of La Criminal Law, as Ano P, Posma Situmorang, and Bernhard. P has the advantage of knowing something or things that should be suspected in the case

obtained from crime, which caused losses to the State, and indirectly it is a criminal act which, against a tax fraud, the Prosecutor General's claims with 6.7/PID BmT9/PNTKTP^W- " *• ,he C°Urt Dedsio" number . . . D D o- S In accor<*ance with the principle taxation law,

as the Ario. P, Posma Situmorang, Bernhard. P, Roy Bestly and Tri Suwito. A cooperation agreement t0 berindikasi money (0 ^ of ^ namely the formif^ taxes, in addition they also make mistakes of omission or deliberateness form, (Article 38 Article 39, and section 39A), the Decision of the Court of Tax 615/PID.B / 1999/PN.JKT.PST accordance with the rule of law taxation.